



DESERTASI

KEMITRAAN DALAM BISNIS : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis
dengan Prinsip *Mudharabah* di Perbankan Syariah)

Oleh

HIRSANUDDIN

850000009X

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
2005



DESERTASI

**KEMITRAAN DALAM BISNIS : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BISNIS
DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH)**

OLEH

HIRSANUDDIN

850000009X

PROMOTOR



PROF. Dr. H.M. TAHIR AZHARI

CO PROMOTOR


PROF. Dr. FATHURRAHMAN DJAMIL

CO PROMOTOR


Dr. RIFYAL KA'BAH LC. MA.

MENGETAHUI PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Ketua



Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H(Promotor)
2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil.....(Ko-Promotor)
3. Dr. Rifyal Ka'bah, Lc.,M.A(Ko-Promotor)
4. Prof. Dr. H. Achmad Sukardja, S.H., M.A.....(Penguji)
5. Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.....(Penguji)
6. Dr. Uswatun Hasanah, M.A(Penguji)
7. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.....(Penguji)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi yang sangat dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah krisis di bidang ekonomi. Krisis Indonesia dimulai dengan tertekannya nilai tukar rupiah, yang kemudian menjadi krisis moneter (krismon), dan setelah meluas dan mendalam berkembang menjadi krisis total (kristol), menyangkut hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Proses ini terjadi dengan cepat meluas dan mendalam jauh melampaui perkiraan kebanyakan orang termasuk para ahli bahkan mereka yang pesimis sekalipun¹.

Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, *world Economic outbook* 1998 digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu : *Currency Crisis, Banking Crisis, Sitemic Financial Crisis* dan *Foreign Debt Crisis*². Dari segi timbulnya krisis, laporan ini nampaknya

¹ J. Soedrajad Djurandaud, *Bergelut dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 3

² *Loc., Cit*

menggambarkan bahwa, pada dasarnya krisis merupakan akibat dari gejolak finansial atau ekonomi dalam perekonomian yang mengidap kerawanan³. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijakan makro yang tidak tepat, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik. Kerawanan dapat pula berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, ketidakseimbangan atau *misaignment* nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan Yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas sebagai akibat dari perilaku ikut-ikutan atau *hard instinct* dari pelaku usaha⁴.

Pandangan-pandangan mengenai sebab timbulnya krisis yang beraneka ragam tersebut, mungkin dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ; mengatakan bahwa sebab utama krisis adalah masalah internal ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan (perbankan). Ini dasar argumentasi Paul

³ *Ibid*

⁴ *Loc., Cit.*

Krugman, ahli ekonomi kenamaan dari MIT. Kelompok kedua mengatakan bahwa krisis ini timbul dari perubahan sentimen pasar, masalah eksternal dari suatu ekonomi nasional yang diperkuat dengan dampak penularan (*contagion effects*) ini menjadi dasar dari argumen ahli, seperti Jeffry Sach, ahli ekonomi dari Harvard University⁵.

Ketidakpercayaan terhadap rupiah menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan (timbul proses penyelamatan dana perbankan oleh para pemiliknya atau *flight to Safety*) yang mendorong timbulnya krisis perbankan, bank-bank tidak hanya ditinggalkan deposit tapi juga oleh bank-bank lain⁶.

Mengenai perkembangan terjadinya krisis, mungkin secara kronologis dapat disebutkan secara singkat, apa yang terjadi sejak bulan Juli 1997 sebagai berikut :

1. Nilai tukar rupiah terhadap USD mulai tertekan setelah terjadi hal yang serupa terhadap baht Thailand yang diikuti dengan pengambangan Baht tanggal 2 Juli 1997.
2. Dilakukan pelebaran kurs intervensi rupiah dari 8% menjadi 12% pada 11 Juli 1997, setelah dilakukan pelebaran sebanyak enam kali sejak 1994. Ringgit Malaysia diambangkan 14 Juli 1997.

⁵ *Ibid*

⁶ *Loc., Cit.*

3. Dilakukan penghapusan rentang kurs intervensi atau pengembang besaran rupiah pada tanggal 14 Juli 1997, dilakukan intervensi pada pasar valas untuk menghadapi tekanan yang timbul baik setelah pelebaran kurs intervensi maupun setelah Agustus 1997.
4. Dilakukan langkah-langkah pengetatan likuiditas untuk mendukung upaya mempertahankan kurs yang antara lain dilakukan dengan intervensi. Pengetatan likuiditas dilaksanakan melalui kebijakan moneter dan fiskal dengan berbagai bentuknya, seperti penundaan pengeluaran anggaran. Peningkatan suku bunga SBI sampai dua kali lipat, dan perubahan deposito dialihkan dari BUMN ke dalam SBI⁷.

Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akhirnya menyebabkan terjadinya beberapa fenomena dimasyarakat yaitu :

- a. *flight quality* ; yaitu berpindahnya dana-dana dari bank yang dianggap memiliki risiko yang lebih rendah, yaitu bank-bank pemerintah dan terutama bank asing yang besar.
- b. *Flight to safety* ; yaitu berpindahnya dana-dana dari dalam negeri yang dianggap sangat tinggi risiko penanamannya ke luar negeri. Disinilah istilah *capital flight* memperoleh justifikasinya.
- c. *Flight to Currency* ; yaitu berpindahnya penanaman dana dari yang bersifat tabungan atau deposito menjadi penanaman dalam bentuk uang kes. Uang kes tersebut disimpan di rumah, di brankas, di bawah bantal bahkan juga di *safe deposit* di bank-bank⁸.

Langkah penutupan 16 bank tersebut ternyata tidak menghentikan proses mundurnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai hal :

⁷ *Loc., Cit.* hlm. 7

⁸ Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF*, 2004, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27-28

- kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi.
- Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi krisis dan akhirnya bermuara pada mundurnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan⁹.

Proses penurunan kepercayaan tersebut semakin lama semakin berlangsung alot :

1. Nilai tukar rupiah, yang menjadi permasalahan hanya sebentar menunjukkan perbaikan, yaitu pada saat bantuan IMF didahului oleh intervensi bersama antara bank Indonesia, *Monetary Authority of Singapore* dan Bank of Japan. Sesudah itu nilai tukar kembali memburuk, terlebih lagi setelah dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti *backlash* terhadap penutupan 16 bank.
2. Penarikan dana dari perbankan yang semakin lama justru semakin besar untuk ditanamkan kembali kepada bank-bank asing. Dalam hal ini ketiga fenomena yang terjadi yaitu : *flight to quality*, *flight to safety*, dan *flight to currency* sangat menampakan bentuknya yang mengerikan.
3. Suku bunga perbankan yang sangat tinggi, yang pada akhirnya justru menunjukkan tingginya risiko yang ditanggung oleh deposan, merupakan refleksi "premium" yang harus dibayar bank untuk risiko tersebut¹⁰.

Merosotnya nilai tukar mata uang rupiah yang sangat parah ditambah melonjaknya suku bunga dan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*

dihentikannya perpanjangan (*rollover*) fasilitas pembiayaan oleh *shahibul mal* luar negeri, akhirnya menyebabkan sejumlah konglomerat dan bank mengalami kesulitan keuangan¹¹.

Jika ditelaah lebih jauh, rentannya nilai tukar rupiah merupakan kondisi yang terjadi akibat akumulasi beberapa variabel yang memang kurang mendukung untuk terciptanya mata uang rupiah yang stabil¹². Sistem devisa bebas merupakan alasan utama mengapa mata uang rupiah berfluktuasi mengikuti kebebasan pasar. Begitu bebasnya arus uang keluar masuk ke negara kita selama kekuatan penawaran dan permintaan tidak seimbang, maka kurs rupiah akan mengikuti arah mana yang lebih kuat¹³.

Dengan perkataan lain, krisis perbankan dan mata uang dapat menarik lingkaran setan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Indikator kekuatan keuangan akhirnya sangat penting ketika menilai kerapuhan suatu negara terhadap krisis dan pengaruh ekonomi terhadap stabilitas kurs mata uang. Peranan sentral dari lembaga keuangan juga menunjukkan

¹¹ Krisma Wijaya dan Djoko Retnadi, *Konsolidasi Perbankan Nasional, Dari Refitalisasi Menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, Jakarta, Masyarakat Profesional Madani, 2005, hlm. 91

¹² *Loc., Cit*, hlm. 125

¹³ *Ibid*

pentingnya menguasai dan mengatur sektor ini untuk membatasi pinjaman berlebihan dari luar negeri dan untuk mengurangi risiko kekurangan likuiditas yang akan memicu krisis keuangan¹⁴.

Hubungan umpan balik antara bisnis perbankan dan mata uang terletak pada pendekatan fundamental sebagaimana juga kesehatan neraca sektor keuangan dan sindrom pinjaman yang berlebihan, sebaliknya, krisis yang dipicu oleh likuiditas dalam sektor perbankan menggambarkan interaksi antara penghargaan dan hasil¹⁵.

Krisis mata uang telah mempengaruhi secara signifikan sektor perbankan pada saat kerugian bank dalam mata uang asing tidak dapat dibayar¹⁶. Biaya yang ditimbulkan oleh krisis perbankan, seperti likuiditas bank yang bermasalah, akan ditanggung oleh sektor publik atau rakyat. Krisis perbankan pada akhirnya akan berkaitan dengan situasi semakin memburuknya posisi anggaran belanja suatu negara¹⁷. Kesimpulannya, ketuhan ekonomi negara akibat krisis mata uang sangat tergantung pada kesehatan dan

¹⁴ Sufyan S. Harahap, *Pelajaran Dari Krisis Asia*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2003, hlm. 55

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Loc., Cit*, hlm. 56

stabilitas sektor perbankan. Kekuatan lembaga intermedier keuangan juga akan mempengaruhi dampak evaluasi pada berbagai variabel yang nyata.

Dari rentang waktu yang berjalan, tercatat banyak persoalan perbankan yang muncul di Indonesia. Persoalan yang terkadang membuat banyak kalangan terhenyak, seolah tidak percaya bahwa kondisi perbankan kita menyimpan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan

Kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil elit ekonomi, serta para pengusaha baik pribumi dan non-pribumi yang dekat dengan penguasa.¹⁸ Akibatnya terjadilah kesenjangan, di satu sisi sebagian kecil penguasa dan pengusaha menikmati sumber daya alam dan

¹⁸ Menurut Anwar Nasution, terlalu terkonsentrasinya kredit perbankan hanya pada sejumlah perusahaan tertentu saja, yakni sekitar 300 perusahaan, khususnya 50 konglomerat. Proses seleksi atau pengeluaran *pembiayaan* tidak dilakukan secara profesional menurut prosedur bank yang sebenarnya dan sangat dipengaruhi oleh KKN. Proses yang buruk ini, selain karena lemahnya pengawasan BI, juga diperparah oleh tekanan politik (campur tangan pemerintah dan tokoh berpengaruh) yang terlalu besar terutama dalam pengaturan pinjaman. Tulus Tambunan, *Loc., Cit.*

asset-asset ekonomi, sementara di sisi lain sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan.¹⁹

Perbankan merupakan institusi ekonomi Indonesia yang paling besar terkena imbasnya dari krisis ekonomi yang terjadi, tanpa menafikan institusi lainnya. Hal itu memang wajar, sebab krisis ekonomi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya merupakan krisis yang diawali dari dunia perbankan.²⁰

¹⁹ Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin, karena masih hidup dengan penghasilan di bawah 2 Dollar AS atau Rp 18,310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia. Ekonom senior Bank Dunia, Jehan Arulpragasam, mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan ke-14 antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara dan lembaga keuangan multilateral anggota Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2004. Kompas, 24 Januari 2005.

²⁰ Muslimih H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia. Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 138.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Mar'ie Muhammad) saat itu, mengemukakan bahwa pencabutan izin usaha Bank itu disebabkan oleh : 1) Aset yang dimiliki tidak cukup untuk menutup kewajibannya, hal ini disebabkan karena besarnya *pembiayaan macet*, 2) Akibat besarnya *pembiayaan macet*, maka penghasilan yang diperoleh bank tidak bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkannya, 3) Kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat semakin berkurang, sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada pasar uang antar bank yang berjangka pendek dan berbunga tinggi. 4) karena akumulasi kerugian yang semakin besar mengakibatkan modal menjadi negatif. **Harian Umum Republika**, 11 Nopember 1997. Perbankan sebagai sektor yang berfungsi sebagai intermediasi aliran dana, menduduki posisi yang kritis dalam krisis ekonomi yang berlangsung. Kalau sektor perbankan tidak tahan menghadapi gejolak ekonomi karena strukturnya lemah, maka bukan sektor perbankan saja yang berpengaruh tetapi juga sektor-sektor ekonomi lainnya khususnya yang sangat tergantung pada dana perbankan seperti industri manufaktur, perdagangan dan konstruksi akan mengalami kehancuran. Tulus Tambunan, *Op. Cit*, hlm. 203.